

**KONFLIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)  
TAHUN 2014-2016**

By:  
**Feri Arawan**  
Email:feri15arawan@gmail.com

Advisor:  
**Dr. Hasanuddin, M.Si**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Pekanbaru  
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293  
Telp/Fax. 0761-63272

**ABSTRACT**

*PPP is a big house for Moslem, but then this political parties with symbolize Ka'bah often attacked of conflict around the secretariat among the conflict between faction on beginning stand, conflict of Djaelani Naro and politicians NU. After reformation PPP obtain the serious problem who influential on gaining vote in General Elections 1999. Declined of gaining vote PPP make the PPP determine coalition on Pilpres 2014. In beginning determine of coalition PPP return obtain conflict, begin with attitude Suryadharma Ali who reputed unilateral by 27 DWP when attend open campaign political parties of Gerindra. Then, the conflict fluctuate when KPK decide SDA as accused of corruption donation of Haji on year 2010-2011 and 2012-2013. PPP doing Mukernas in Bandung and dismissal SDA as chief from position as chief in PPP. However, SDA opposed dismissal herself and claimed Mukernas in Bandung is illegal. Then, SDA dismiss some caretaker daily PPP that is, Romahurmuziy, Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, Reni Marlinawati, Joko Purwanto, Dini Mentari, Emalena Muslim, Aunur, Rusli Effendi, Yusroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Siti Maryam, Siti Nurmala, and Mahmud Yunus.*

*The aim of this research is to explain about process of happen the conflict PPP on year 2014-2016. From this research eventually will be seen how about the conflict it be ongoing. The approach theory is used as instrument of analysis conflict PPP on year 2014-2016 is a theory of political parties and conflict. While, the method by using Library Resesarch consider as most important of data aggregate and documentary.*

*Based on the result of research, the conflict internal PPP start from decision SDA as accused case of corruption criminal. The conflict of PPP continued because there is no central figure who regarded by cadre within the solution of problem and solution of the conflict will be done by arbitration method.*

**Keyword : Conflict, Dualism of Leadership, PPP.**

## A. PENDAHULUAN

Partai persatuan pembangunan (PPP) didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 dengan asas Islam. Partai ini merupakan hasil fusi empat partai Islam sebelumnya yaitu NU, PERMUSI, PSII, Dan PERTI. Tujuan dari penggabungan empat partai tersebut adalah agar terjadi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada awalnya, jabatan Ketua Umum dibentuk presidium yang terdiri dari KH. Idham Chalid sebagai presiden partai serta Mintardja, Thayed Gobel, Rusli Halim, dan Masyur sebagai wakil presiden partai. Setelah diklarasikan, ketua pertama adalah HM Syafaat Mintarjda SH (5 Januari 1973-1978), kemudian dilanjutkan H. Djailani Naro (1978-1989), Ismail Hassan Metareum (1989-1998).<sup>1</sup>

Internal PPP sering menuai konflik diantaranya konflik antar faksi pada awal PPP berdiri 1973, Konflik Djaelani Naro dan politisi NU pada 1978, Suara PPP pada Pemilu 1987 merosot, Djaelani Naro dicopot, PPP terbelah saat pemilu 1999.<sup>2</sup>

PPP bertahun-tahun menjadi penurut terhadap rezim Orde Baru, namun partai ini berhasil mempertahankan hidup hingga ke masa reformasi dengan keluarnya

sebagai partai yang memiliki suara terbanyak keempat dan jumlah kursi ketiga terbesar pada pemilu 1999. Keuntungan PPP adalah namanya yang sudah dikenal dengan pemilih yang terbiasa memilih PPP, sebuah organisasi nasional, dan legitimasi reformasi karena posisinya sebagai partai oposisi paling dinamis di akhir zaman Orde Baru.<sup>3</sup>

Gelombang reformasi 1998 berpengaruh terhadap PPP. Partai ini mengalami masalah-masalah serius yang berpengaruh pada perolehan suara nasional pada Pemilu 1999. Konflik internal yang menjadi ciri khas partai yang berlambang kabah ini masih seputar masalah sektarian, yang kemudian membelah-belah basis massa partai.<sup>4</sup> Misalnya, ketika Gus Dur membentuk PKB. Meski PKB bukan sempalan PPP, tetapi terbentuknya PKB otomatis menggerogoti suara PPP dari basis massa NU. Begitu juga dengan pembentukan PAN oleh Amien Rais. Meski PAN juga bukan sempalan PPP, tapi basis massa PPP dari Muhammadiyah punhabis.

Rendahnya perolehan suara PPP pada Pileg 2014 membuat Partai Kabah ini harus menentukan koalisi pada pilpres 2014, pada saat pemilihan presiden 2009 samapai pileg 2014 tamapak tidak ada konflik mencolok diinternal Partai Kabah itu. Namun suasana berubah drastis usai Pemilu 2014. Prahara kembali melanda partai ini. Dipicu Sikap Suryadharma Ali

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Ridho Al-Hamidi, Partai Politik Islam Teori dan Praktik Di Indonesia, (Yogyakarta; Graham Ilmu, 2013) Cet. I, H. 6-7

<sup>2</sup> Beberapa uraian konflik PPP tersebut diantaranya karna perdebatan ideologi yang sebagaimana ppp terbentuk dari beberapa golongan dari hasil fusi partai yang dipaksakan sepemahaman dengan ppp yang berazaskan islam(uraian penulis dari Syamsudin Haris, PPP Dan POLITIK ORDE BARU Pt Garasindo Jakarta 1991)

---

<sup>3</sup> Panduan Parlemen Indonesia (Jakarta: Yayasan API, 2001), h. 128

<sup>4</sup>Merdeka.Com.<http://berita.suaramerdeka.com/kemenkumhamditudingpenyebabawalkisruhppp/>Dikutip pada hari Rabu 05 Oktober 2016. Jam 00.37

SDA menghadiri kampanye Partai Gerindra yang dinilai oleh 27 pengurus DPW PPP di daerah sebagai "perselingkuhan politik". Dan menyalahi AD/ART partai yang sebagai mana terdapat dalam ketetapan Muktamar VI partai persatuan pembangunan No. 03/TAP/ Muktamar VI/PPP/1/2007 Tanggal 01 Februari 2007 Bab V tentang Kedaulatan Pasal 6 menyebutkan, kedaulatan partai persatuan pembangunan berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Muktamar.<sup>5</sup>

Sikap Suryadharma Ali yang dianggap telah melanggar AR/ART partai, didalam Mukernas II PPP di Bandung mendesak pengurus PPP menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma Ali, dalam Mukernas itu memutuskan memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum PPP. Sementara Emron Pangkapi menjadi Pelaksana harian (Plh) Ketum PPP menggantikan Suryadharma sesuai Pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PPP hingga pelaksanaan Muktamar. Sejumlah kader yang dipecat Suryadharma Ali pun dipulihkan kembali. Namun Suryadharma Ali menegaskan pemberhentian dirinya sebagai Ketum PPP tidak sah.<sup>6</sup>

Konflik ini melahirkan dua kubu yaitu, kubu Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum partai yang sekarang dipimpin oleh Djan Farisz, didukung oleh Fernita Darwis, Epyardi dan kubu Muhammad Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal PPP didukung Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saifuddin, Reni

<sup>5</sup><http://www.ppp.or.id/index.php?option.com>  
. Dikutip pada hari sabtu. Jam 02.11

<sup>6</sup><http://www.metrotvnews.com/amp/zNPEYGEb-awal-perseteruan-panas-ppp>

Marlinawati, Joko Purwanto, Dini Mentari, Emalena Muslim, Aunur, Rusli Effendi, Yusroni Yazid, Hizbiyah Rohim, Siti Maryam, Siti Nurmala, dan Mahmud Yunus.

Dua kubu PPP yang berkonflik menghasilkan dua keputusan dari dua Muktamar yang berbeda, yakni kubu Ketua Umum hasil Muktamar VIII Surabaya dan kubu Ketua Umum Djan Faridz hasil Muktamar VIII Jakarta.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Tahun 2014-2016"

## B. TELAHAH PUSTAKA

### 1.4.1 Partai Politik

Partai Politik secara umum diartikan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>8</sup>

Carl J. Friedrich, sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

<sup>7</sup>Dari hasil Muktamar Surabaya kubu mengajukan intervensi PPP ke PTUN dan disahkan oleh PTUN, kubu Djan Farisz ketua hasil Muktamar Jakarta yang tidak menerima keputusan itu, melakukan gugatan dan gugatan Djan Farisz disahkan oleh PTUN yang sebagai mana tertuang dalam surat keputusan 97/G/2016/PTUN-JKT menyebutkan: Pertama, mengabulkan gugatan permohonan untuk seluruhnya.

<sup>8</sup>Meriam Boedihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2005) Hal 161-160

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.

Sigmund Nuemann dalam karangannya *modern political parties* mengemukakan definisi Partai Politik sebagai organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Tugas Partai Politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan opini publik lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.<sup>9</sup> Didalam Negara modern, menurut Miriam Budiardjo Partai Politik mempunyai beberapa fungsi:<sup>10</sup>

1. Sebagai sarana komunikasi politik :

Partai Politik berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang berbekas seperti suara dipadang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan

“penggabungan kepentingan” (*intereste aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, “perumusan kepentingan” (*intereste articulation*).

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Didalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik didalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus-kursus penataran, dan sebagainya.

3. Sebagai sarana rekrutment politik

Dalam hal ini Parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik untuk menjadi kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selction of leadership*).

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Didalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik, Parpol berusaha untuk mengatasinya sementara itu ramlan surbakti berpendapat bahwa fungsi utama Parpol adalah mencari dan

<sup>9</sup> Jimly Ass Hiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006), hal. 115-116

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Op cit*, hal. 163

mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.<sup>11</sup>

#### 1.4.2 Konflik

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan seringkali bersifat kreatif, dimana hal ini terjadi ketika tujuan antara satu manusia dengan manusia lainnya tidak sejalan. Peter Harris dan Ben Reily<sup>12</sup> mengungkapkan bahwa konflik adalah salah satu faktor positif yang paling kuat untuk perubahan didalam masyarakat.

Menurut Ralff Dahrendorf, mengemukakan hubungan konflik dan pertentangan sosial adalah semua hubungan diantara kumpulan-kumpulan individu yang menyangkut suatu perbedaan tujuan yang bertentangan, dalam bentuknya yang paling umum berupa keinginan kedua belah pihak yang bersaing untuk mencapai suatu yang hanya tersedia untuk satu pihak atau sebagian saja.

Dalam buku perbandingan sistem politik, Mochtar Mas`Oed dan Colin Mac Andrews menyebut konflik penguasa (*ruling clique*) yaitu kelompok tunggal yang mengkoordinir dan mengendalikan keputusan sampai di luar bidang-bidang kebijaksanaan. Kelompok tunggal itu terdiri dari pemerintah.

Loeppald Wise dan Howald Belker, mendefinisikan konflik suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang

pihak lawan yang di sertai dengan ancaman dan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi.<sup>13</sup>

##### 1.4.2.1 Penyebab konflik politik

Pada dasarnya konflik disebabkan oleh dua hal, yakni mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal.<sup>14</sup> yang di maksud dengan kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara cultural, seperti suku, bangsa, daerah, agama, dan ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti, petani, buru, pedagang, pengusaha dan lain nya. Dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota. Hal ini menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lainnya.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik karena sebagian masyarakat yang tidak memiliki atau sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok lain yang mendominasi ketiga sumber tersebut.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik, karena secara fakta terdapat masyarakat yang menerima perbedaan-perbedaan

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, 1992), hal. 116

<sup>12</sup> Harris, Peter & Ben Reilly Democracy And Deep-Rooted Conflict (Options For Negotiators, Stocholm:IDEA) hal 32

<sup>13</sup> Yulianto Sigit Wibowo, Marheanisme: Ideologi Perjuangan Sukarno (yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), Hal 58.

<sup>14</sup> Ibid, Hal 154

tersebut. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini baru menimbulkan konflik. Apabila kelompok tersebut memperebetkan sumber yang sama, seperti kekuasaan, kesempatan, kekayaan, dan kehormatan. Konflik terjadi mana kala terdapat benturan kepentingan. Konflik terjadi jika ada pihak yang merasa di perlakukan tidak adil, atau mana kalah pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal merupakan kondisi yang harus ada bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai untuk menimbulkan konflik.

#### 1.4.2.2 Tipe-tipe konflik politik

Konflik politik di kelompokan menjadi dua tipe, kedua tipe ini melibatkan konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan konflik positif adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang di sepakati bersama dalam konstitusi. Sebaliknya konflik negatif yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara yang non konstitusional, seperti kudeta, sparatisme, terorisme dan revolusi.<sup>15</sup>

#### 1.4.2.3 Struktur konflik politik

Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya di bedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum konflik*) dan konflik menang-menang (*non zero-sum konflik*).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Lihat Pendapat Ralf Dahrenrof Dalam Buku Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta Gramedia Widia Serana Indonesia 1992) Hal 150

<sup>16</sup> Lihat Pendapat Dahrenrof, Ibid Hal. 154

#### 1.4.2.3 Pengaturan konflik

Penyelesaian konflik lebih merujuk pada sebab-sebab konflik. Dengan asumsi selama ada antagonisme dalam kepentingan masyarakat. Menurut ralf dahrendorf, pengaturan konflik sangat efektif bergantung pada tiga faktor.<sup>17</sup> pertama, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (adaanya pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan pihak lain). Kedua kepentingan-kepentingan yang di perjuangkan harus terorganisasikan secara secara rapi, tidak tercerai berai dan terkontak-kontak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Ketiga, dua bela pihak menyepakati aturan main (*rules of the game*) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan iteraksi antara mereka. Ketika ketiga syarat ini dipenuhi maka berbagai pengaturan konflik dapat di buat dan dilaksanakan.

#### C. METODE PENELITIAN

Untuk membahas mengenai konflik partai persatuan pembangunan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan menggunakan suatu metode mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, kemudian menganalisa data, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai factor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang di selidiki.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ibid, Hal 230

<sup>18</sup> Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Karya,1998) Hal 26

Sementara tujuan dari penggunaan jenis penelitian diskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup>

#### **D. DINAMIKA KONFLIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

##### **3.1 Konflik PPP Pada Masa Kepemimpinan SDA**

###### **3.1.1 Awal Mula Konflik “Klaim Sepihak Surya Dharma Ali”**

Saat Koalisi terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di internal partai berlambang Ka'bah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014. Menurut kubu , kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur Parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional II PPP di Bandung.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004) Hal 26

<sup>20</sup>LihatdiMerdeka.Com.  
<http://berita.suaramerdeka.com/kemenkuma-m-dituding-penyebabawalkisruhppp/>Dikutip pada hari Rabu 05 Oktober 2016. Jam 00.37 Wib

Ketua Sedangkan dari data yang penulis dapat dari wawancara bersama pihak DPW PPP Provinsi Riau dengan wakil sekretaris bidang antar lembaga, bapak Dandy Yandra beliau menyatakan

*“konflik berawal dari penetapan suryadharma ali sebagai tersangka oleh KPK dan sebagaimana yang terdapat dalam AD/ART partai bahwasanya itu melanggar AD/ART partai dan sudah semestinya suryadharma ali diberhentikan, namun keserakaan surya dharma ali yang tidak mau melepaskan jabatan ketuanya itu yang menjadi persoalan tanggassnya”.*<sup>21</sup>

Kerakusan SDA tersebutlah terjadinya Mukhtar di Surabaya dan Pondo Gede sambungnya lagi, yang sebagaimana penulis juga akan menjabarkannya juga pada bahasan selanjutnya.

Semakin sedikit posisi atau sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok dalam organisasi politik, makin tajam konflik dan persaingan di antara mereka untuk merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya, dikatakan di dalam hirarki sosial dimanapun hanya ada sejumlah terbatas posisi sosial kekuasaan yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat mendudukinya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bapak Dandy Yandra di kantor DPW Provinsi Riau

<sup>22</sup> Lihat Syamsuddin Haris Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru Jurnal Analisis CSIS, 1988. hlm.271( begitu juga dengan telaah penulis terhadap dengan awal terjadinya konflik di

Dari keterangan pasal 12 hurup e jelas SDA sudah melakukan pelanggaran AD/ART partai, diterangkan dalam pasal 13 ayat 5 menyatakan setiap anggota sebagaimana dimaksud pasal 12 hurup e yang telah dinyatakan bersalah dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) dikenakan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota.<sup>23</sup>

Menurut analisis penulis tentang latar belakang dari tokoh-tokoh PPP yang berkonflik pada 2014-2016, berlatar belakang dari Nahdatul Ulama. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. pernah menjabat sebagai Ketua PMII Periode 1985-1988, sebagaimana diketahui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah wal Jama'ah.

### **3.1.3 Pergolakan Setelah Pemilihan Presiden 2014**

Pemilihan presiden 2014 di menangkan oleh kolisi Indonesia hebat Jowi-Jk dengan perolehan suara 53,15 persen suara, setelah pemilihan presiden tersebut konflik PPP kembali mencuat, konflik menyeruak di internal. Rapat

---

kubu PPP kepentingan individu pemimpin partai untuk melenggangkan kekuasaannya sebagai ketua partai ia menggunakan kekuatan dan penguasaannya untuk mempertahankan suatu jabatan)

<sup>23</sup> Dalam AD/ART PPP, ketetapan muktamar VIII PPP 2006 pasal 12 dan 13

pengurus harian (RPH) DPP PPP pada Rabu 10-9-2014 memutuskan memecat Suryadharma Ali dari Jabatan Ketua Umum. Pemecatan itu dilakukan karena Suryadharma Ali tidak segera mundur meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi haji. Padahal dalam ketentuan AD ART PPP, Ketua Umum dapat diberhentikan hanya pada saat Muktamar berlangsung, bukan disaat rapat-rapat harian, selain dilakukan dengan tanpa adanya paksaan. Keputusan ini diambil karena Suryadharma Ali dinilai telah meruntuhkan citra partai, sehingga diberhentikan. Namun, Suryadharma Ali tidak terima bermanuver balik dengan memecat tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M. , Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.<sup>24</sup>

PPP telah melalui sejarah politik yang panjang. Namun Partai ini ternyata sangat miskin dengan sosok yang bisa dijadikan figur yang bisa menyatukan anasir-anasir politik Islam. Salah satu penyebab ketiadaan figur pemimpin ini adalah kuatnya intervensi penguasa untuk memecah belah solidaritas PPP melalui figur pimpinan yang direkasaya.<sup>25</sup>

## **3.2 Polarisasi Konflik Dalam Internal Partai Persatuan Pembangunan**

### **3.2.1 Muktamar Surabaya**

Pelaksanaan Muktamar VIII PPP yang digelar oleh kubu di Empire Hotel, Surabaya, dan ditutup pada Jumat 17-10-2014. Muktamar

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak dandy yandra wakil sekretaris bidang hubungan antar lembaga DPW Riau

<sup>25</sup> Partai politik Indonesia 1999-2019 Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa hal,193



ini menghasilkan tujuh keputusan politik yang menjadi pandangan politik lima tahun ke depan dari partai berlambang Kabah ini. Pertama, PPP secara tegas menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dukungan itu dinilai sejalan dengan prinsip PPP, yaitu amar ma'ruf nahi munkar.

Kedua, PPP mengajak semua elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilihan Umum Presiden 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan Negara.<sup>26</sup> Ketiga, Usman menyebutkan, PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sehingga pemilihan umum kepala daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta bebas dari politik uang.

Keempat, PPP mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertahanan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Kelima, PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur. Untuk yang keenam, PPP mendorong pemerintah untuk

---

<sup>26</sup> Pernyataan Ketua Panitia Muktamar VIII PPP Surabaya Usman Doni Tokan

meningkatkan perhatiannya kepada Madrasah dan Pondok Pesantren. Perhatian juga diberikan terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia. Ketujuh, PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai Hari Santri yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November.<sup>27</sup>

### 3.2.2 Muktamar Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 kubu Suryadharma Ali menggelar Muktamar VIII di Jakarta atas usulan dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimun Zubair untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Ka'bah. Hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi Ketua Umum PPP. kubu Djan Faridz mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan. Hasilnya pada November 2014 PTUN mengeluarkan putusan sela yang meminta pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014 ditunda. Artinya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly diwajibkan untuk

---

<sup>27</sup>[http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/13054851/Resmi.Ditutup.Ini.Hasil.Mukta.mar.VIII.PPP.di.Surabaya.\(pernyataan.Romahurmuzy.pada.media.kompas\)](http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/13054851/Resmi.Ditutup.Ini.Hasil.Mukta.mar.VIII.PPP.di.Surabaya.(pernyataan.Romahurmuzy.pada.media.kompas))

menunda pengesahan kepengurusan DPP PPP.<sup>28</sup>

Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII ini dinilai over load. Sebab, ada 3 kepengurusan Muktamar PPP yang ditampung oleh Muktamar ini. "Karena ini ada tiga pihak, (Muktamar) Surabaya, Jakarta dan Bandung. Jadi masing-masing sepertiga," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat 22-4-2016.

Romi telah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar VIII PPP yang digelar 8-10 April di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dia dipilih secara aklamasi setelah peserta Muktamar Islah itu sepakat melakukan pemilihan dengan cara musyawarah mufakat. Sementara, Pimpinan PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz dan loyalisnya sama sekali tak hadir dalam Muktamar itu. Djan menilai kehadiran pada ajang Islah sebagai sebuah kesalahan apa lagi bila dia bergabung dengan kepengurusan Romi. Muktamar VIII PPP merupakan forum Islah dari konflik PPP yang berkepanjangan, telah melahirkan semangat baru buat para kader partai berlambang Ka'bah.<sup>29</sup>

Ketua Umum terpilih hasil Muktamar VIII yakni , bersama sembilan formatur yang dipilih para Mukdamirin, sedang merampungkan susunan kepengurusan PPP priode 2016-2021, dengan konsep

mengakomodir berbagai pihak dengan berbagai latar belakang, khususnya pihak-pihak yang berbeda pendapat dan beberapa tokoh nasional yang selama ini dikenal baik kredibilitasnya.<sup>30</sup>

### **3.2.3 Dualisme Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan**

Dari dua Muktamar berbeda PPP yaitu Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta yang sebagaimana di jelaskan di atas PPP melahirkan dua keputusan yang berbeda pula.<sup>31</sup> Kubu dan Suryadharma Ali saling serang terkait Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Kedua kubu itu menuding Muktamar yang dilakukan baik di Surabaya ataupun di Jakarta adalah ilegal karena sesuai dengan AD/ART partai. Muktamar VIII menyatakan Djan Faridz sebagai Ketum PPP periode 2014-2019.

### **3.3 Resolusi Konflik Partai Persatuan Pembangunan**

#### **3.3.1 Islah**

Cara yang di tempu oleh PPP dalam penyelesaian konflik melalui Islah yaitu dengan permintaan mahkama panesehat partai Mahmum Zubair dengan diadakannya Dua kubu Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta sepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kesepakatan dua kubu

<sup>28</sup> Dalam Artikel Ade Hikmatul Fauziah Sikap PPP Dalam Sekesi Negara

<sup>29</sup> Pernyataan Fadly Nursal yang merupakan salah seorang dari sembilan tim Formatur, kepada wartawan, Senin 18/4/2016 di Gedung DPR Jakarta yang di muat dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/18/masih-digodok-pengurus-dpp-ppp-hasil-muktamar-vii> dikutip rabu 16 08 2017 jam 07:00 Wib

<sup>30</sup>Ibit,<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/18/masih-digodok-pengurus-dpp-ppp-hasil-muktamar-vii> dikutip rabu 16 08 2017 jam 07:00 Wib

<sup>31</sup><http://news.liputan6.com/read/2490537/ta-mpung-3-muktamar-kepengurusan-ppp-muktamar-viii-kegemukan> dikutip rabu 16 08 2017 jam 07:00 Wib

partai berlambang Kabah itu terjadi setelah beberapa orang senior turun tangan mempertemukan keduanya dalam Mukhtar Persaudaraan Muslimin Indonesia<sup>32</sup>

Turunnya para senior, membuktikan kepedulian atas PPP. Sejak awal, saya juga sudah yakin perselisihan dua saudara tidak mungkin tidak bisa diselesaikan," kata dia. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum PPP hasil Mukhtar Surabaya, Emron Pangkapi mengatakan bersyukur dengan kesepakatan bersama yang lahir di tengah gegap gempita Mukhtar Parmusi. Emron yakin cita-cita akan tercapai. Karena itu, sebagai Wakil Ketua Umum hasil Mukhtar Surabaya, menyambut yang dilakukan dalam pertemuan di Batam.<sup>33</sup> Emron menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada yang juga hadir saat pembukaan Mukhtar Parmusi untuk diteruskan.

### 3.3.2 Mukernas Ancol

Anggota Komisi III DPR PPP Asrul Sani menjelaskan, Mukernas PPP digelar di Hotel Mercure, tersebut akan dihadiri oleh semua pengurus partai dari seluruh struktural. Ketua dan sekretaris DPW seluruh Indonesia hasil pengesahan Mukhtar Bandung hadir. Sampai hari ini sudah konfirm ke panitia 32 DPW, dari 34 provinsi. Kurang dua yang belum.

Saat itu, kedatangan keduanya untuk konsultasi dengan

<sup>32</sup> Mukhtar Parmusi dilaksanakan di Batam, Kepri, Jumat. Dan di muat dalam harian

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/13/nl5d1x-dua-kubu-ppp-nyatakan-islah>

<sup>33</sup> Pernyataan emron pengkapi saat pertemuan di Batam

Suryadharma Ali soal kelanjutan Islah PPP pasca SK Menkum HAM. Hal inilah yang belakangan dijadikan pegangan PPP kubu Romi menggelar Mukernas dan bantahan bahwa Suryadharma menolak Mukernas diselenggarakan. Mukernas sendiri menghasilkan sejumlah keputusan. Beberapa di antaranya yakni; menyelenggarakan Mukhtar paling lambat April 2016 yang bertujuan untuk mengadakan Islah terhadap kubu-kubu yang selama ini berkonflik dan Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum menggantikan Suryadharma Ali yang berhalangan karena terjerat kasus korupsi di KPK.<sup>34</sup>

## E. Kesimpulan Dan Saran

### 1.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz adalah konflik politik yang berkaitan dengan puncak kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan PPP, dimana keduanya sama-sama berambisi untuk memegang puncak kekuasaan tersebut. Konflik PPP berawal dari Ketua Umum Suryadharma Ali ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana haji pada periode 2010-2011 dan 2012-2013, saat Ketua Umum PPP terjerat kasus hukum, Romahurmuziy melakukan Mukernas di Bandung dan memecat Ketua Umum SDA dari posisi Ketua Umum karena di anggap telah melanggar AD/ART partai.

<sup>34</sup> <https://www.merdeka.com/politik/konflik-ppp-perlawanan-suryadharma-ali-dari-dalam-penjara.html> dikutip Kamis 18-08-17 jam 06:30

Konflik berlarut-larut karena SDA tidak terimah akan pemecatan dirinya, saat Romahurmuzuiy melakukan Muktamar di Surabaya pihak SDA yang didalangi oleh Djan Farizd juga melakukan Muktamar di di Hotel Grand Sahid jaya Jakarta. Menghasilkan dua putusan berbeda dan mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam PPP.

Muktamar PPP selalu identik dengan konflik yang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, ideologi, kebijakan dan kepemimpinan. Karena PPP terbentuk dari fusi Partai Islam (Nu, Permusi, Psii, dan Perti). Namun dalam konflik yang terjadi pada 2014-2016 bukanlah dikarenakan ideologi. Dari analisis penulis ketiga tokoh yang berkonflik berasal dari Nahdatul Ulama yang mempunyai basis ideologi yang sama.

Konflik yang terjadi pada 2014-2016 dikarenakan krisis kepemimpinan, PPP kehilangan figur. Semenjak ditinggal Kiai Bisri Sjansuri PPP berulang kali dilanda konflik, ketika Kian Bisri masi menjabat sebagai ketua Majelis Syuro partai, konflik masih bisa terelakan karena kepemimpinan partai tunduk kepada Majelis Syuro. Penyelesaian konflik PPP yang terjadi pada tahun 2014-2016 melalu cara yang sesuai dengan AD/ART PPP yaitu Islah dan Mukernas, namun tidak berhasilnya dengan cara tersebut membuat PPP harus menempuh jalur Hukum.

## 1.2 Saran

Organisasi Partai Politik merupakan dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, suda seharusnya kekompakan merupakan faktor terpenting untuk mencapai suatu tujuan. Namun berbeda dengan PPP, hampir tidak

ada kerja sama di dalamnya, sehingga konflik bagian dari citra partai ini.

Sikap elite PPP dalam berkonflik seharusnya bisa mengedapkan Islah sebagai serana penyelesaian konflik tampak adanya intervensi pemerintah dalam partai, saatnya bagi PPP mengedapkan Visi Misi sebagai tujuan dari suatu organisai Partai Politik, dan setiap pimpinan dan para kader partai mematuhi AD/ART partai sebagai landasan hukum suatu organisasi. PPP memerlukan figur yang bisa dipercayaaai oleh setiap kadernya agar bisa menjadi panutan oleh setiap kadernya. Dan berpegang teguh pada asas Islam yang tercantum pada AD/ART, sehingga bisa meminilisir kebutuhan elite PPP akan patronase.

PPP harus lebih bekerja keras untuk meraih kepercayaan masyarakat dan membuktikan jikalau PPP memang sebagai rumah besar bagi umat Islam untuk menyongsong pemilihan umum yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan*, (Setara Press, 2013)

Andree Feillard, *Nu Vis-À-Vis Negara* (LKIS Yogyakarta, 1999)

Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)

Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakaarta: CSIS, 1981)

Abu Ahamadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003)

- Bibit Soeprato, *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia*, (Jawa Timurghalia Indonesia 1985)
- Dean G. Pruit Dan Jeffery Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Ending Turmudi, *Perselingkuhan KIAI dan KEKUASAAN*, (LKis Yogyakarta, 2003)
- Jimly Ass Hiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Secretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK II, 2006)
- Kompas pedia, *Partai Politik Indonesia 1999-2019 Kosentrasi Dan Dekosentrasi Kuasa* (PT Kompas Media Nusantara 2016)
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Karya,1998)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1977)
- Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasation, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer , Edsisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Diskriptif*, (Jakarta:Referensi Gp Press Group 2013)
- Nur syam, *“Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideology Partai Politik Pengalaman Indonesia Orde Baru”*, dalam Jurnal Iain Sunan Ampel, (Surabaya: Iain Sunan Ampel, 1999)
- \_\_\_\_\_ *Panduan Parlemen Indonesia* (Jakarta: Yayasan Api, 2001)
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta Gramedia Widia Serana Indonesia 1992)
- Ridho Al-Hamidi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik Di Indonesia*, (Yogyakarta; GrahamIlmu, 2013)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1992)
- Syamsuddin Haris, *PPP Dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Pt Garasindo 1991)
- Sahidin, *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki*, (Jakarta, Lagung Utama, 2004)
- Tim Divaro, *Profil Partai Politik Peserta Pemilu*, (Jakarta: Erlangga 2014)
- Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia Kontentasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite*, (Yayasan Pustaka Obor Indonrsia Anggota IKAPI DKI Jakarta 2014)
- Zainal Abidin Amir *Peta Islam Politik Pasca-Suharto*, (Jakarta: Pustaka LP3AS, 2003)
- Jurnal Ilmia Politik**
- Dwi Nofiani, *Srategi Politik Pertain Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Calon Legislatif Perempuan Menghadapi Pemilihan Umum (PEMILU) 2014 di Kota Tanjung Pinang*
- \_\_\_\_\_ *Dinamika Pergeseran Positioning*

- Partai-Partai Islam (PPP dan PKS) Setelah Reformasi*  
Eka Nova Prasetya Pinen, *Kebijakan Politik Fusi: Suatu Tinjauan Politik Kepartain Rezim Orde Baru*
- Fitri Rahmadania *Rekrutmen Calon Legislative Pada Pemilu 2014 Studi Kasus: Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V Di Kabupaten Sampan, Jawa Timur*
- Hassanudin Yusup Adan, *Partai Politik Dalam Perseptif Islam*
- Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Paartai Politik*  
\_\_\_\_\_ *Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Politik Islam Di Indonesia*  
\_\_\_\_\_ *Kebijakan Pemerintahan Orde Baru Terhadap Partai Politik Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan*
- Kamarudin, *Konflik Internal Partai Poltik: Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa*
- Moh. Attamami Al-Islah, *Dukungan Suara Nu Dalam Kemenangan PPP Pada Pemilu 1977-1982 Di Kabupaten Gresik*
- M. Arsyad Mah`Ul, *Partai Politik Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru*
- Nurul azizah, *Peran Dan Fungsi Partai Poltik Islam Sebagai Rumah Anspirasi Masyarakat Studi Kasus: DPW PPP Jatim*
- Nurul Shobacha, *Srategi Politik Nahdatul Ulama di Era Orde Baru*
- Sudarno SHOBRON, *Prospek Partai Islam Ideologis di Indonesia*
- Putri Intannia, *Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilu Umum Legislatif 2014*  
\_\_\_\_\_ *Perselisihan Kepengurusan Partai Politik Di Era Reformasi (GOLKAR dan PPP)*
- Tri Cahya Indra Permana, *Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal*
- Triono, *Fakto-Faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu 2014*
- Yedi Purwanto, *Masa Depan Partai Politik Islam Dalam Pertarungan Pemilu 2009*
- Yulion Zalpha, *Analisis Konflik Pada Munas Golkar 2014*
- Majalah**  
Forum Keadilan, *50 Tahun Indonesia Merdeka: Kini Sudah Demokratiskah Kita, Malajah Hukum Dan Demokrasi: 50 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta Agustus 1955, Pt. Temptint*
- Artikel**  
Ade Hikmatul Fauzia, *Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014*
- Internet**  
<https://www.merdeka.com/pemilu-2014/sejarah-panjang-konflik-partai-kabah/konflik-usai-pemilu-2014-perselingkuhan-politik-sda.html> di kutip pada hari jumat 09-06-2017 jam 22; 45  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/13054851/Resmi.Ditutup.Ini.Hasil.Muktamar.VIII.PPP.di.Surabaya>.

<https://www.merdeka.com/politik/ku-bu-romi-lontarkan-9-alasan-muktamar-ppp-versi-sda-abal-abal.html>. di kutip kamis 17 08 17 jam 06; 36

<https://nasional.sindonews.com/read/913246/12/muktamar-surabaya-dianggap-sesuai-arahan-majelis-syariah-ppp-1413786306>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/04/18/masih-digodok-pengurus-dpp-ppp-hasil-muktamar-vii>

<http://news.liputan6.com/read/2490537/tampung-3-muktamar-kepengurusan-ppp-muktamar-viii-kegemukan>

<https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20161123/281556585422819>

<http://news.liputan6.com/read/2443590/ppp-gelar-mukernas-di-jakarta-besok>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/13/nl5d1x-dua-kubu-ppp-nyatakan-islah>

Merdeka.Com. Dikutip pada hari Rabu 05 Oktober 2016. Jam 00.37

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/13/290975/awal-perseteruan-panas-ppp>, di Kutip Minggu 12 02 17 Jam 01:15

### **Sumber Lainnya**

Ketetapan Muktamar VIII Partai  
Persatuan Pembangunan 2016

AD/ART Partai Persatuan  
Pembangunan (PPP) Tahun 2007

Undang Nomor 2 Tahun 2011